

INTEGRASI ETNIS INDIA PASCA PENETAPAN KEBIJAKAN *1MALAYSIA POLICY*

Oleh :

Siti Muslimah

(Sitimuslimah_2205@yahoo.co.id)

Pembimbing : Irwan Iskandar, S.IP, MA.

Bibliografi: 4 Jurnal, 2 Essai, 31 Buku, 11 Artikel, 35 Website.

Abstract

The diversity of Malaysian society which consists of Malay race, Chinese and India has a myriad of policies that make the country engaged in racial conflict. In 1971, Tun Abd Razak submit proposals regarding economic policy that NEP (New Economy Programme). The policy aims to protect the ethnic Malay. It was based on concerns raised that the residents are ethnic Chinese and Indians at the time had a better life than the residents are ethnic Malays. The condition is feared to turn off citizens to ethnic Malays, these policies have been positive discrimination a form of affirmative action policies designed to rectify the shortcomings of a group.

One of the main objectives in the process of nation building in Malaysia is the formation of national identity, which previously no single identity that unites the various ethnic groups in Malaysia. Then development the Malaysian government thinking to make a policy formula to unite the community in strengthening the country in facing globalization for the sake of national achievement. In 2010, the Malaysian government has a new policy in the know with the policy of One Malaysia. This study aims to reveal how Integratin Of Ethnic Indian After The Determination Of 1Malaysia Policy. The reality of the existence of the theory of constructivism researchers used the National Integration Theory of Ethnicity and Nation State and National-Building concept in the process of this thesis research. Mechanical research is interview and direct observation by researchers.

The results showed the Process Of Integration Of Ethnic Indians After The Determination Of 1Malaysia Policy has not gone well. Still there are some forms of discrimination against ethnic Indians in which the government is legally legalize discrimination.

Keywords: *Integration, Ethnicity, National Building, 1Malaysia Policy, Discrimination.*

I. PENDAHULUAN

Keragaman masyarakat Malaysia yang terdiri dari Ras

Melayu, Tinghoa dan India ini memiliki segudang kebijakan yang membuat negaranya terlibat dalam

konflik rasial. Pada tahun 1969 terjadi krisis antara suku bangsa Melayu dan suku bangsa non-Melayu yakni suku bangsa Tionghoa. Hal tersebut terjadi karena kebijakan yang dibuat dan disepakati sebelumnya dalam pembagian konstitusional dianggap tidak efektif. Sebelum Inggris melepaskan Malaysia, sejarah penuh dibuatlah kesepakatan dalam pembagian secara konstitusional. Kebijakan tersebut diantaranya adalah memberikan *privilege* kepada masyarakat Melayu untuk memegang politik, agama dan menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional dan memberikan *privilege* kepada Tionghoa dan India dalam bidang perekonomian. Namun kebijakan tersebut dirasa tidak efektif bagi masyarakat Melayu karena terjadi kesenjangan dalam ekonomi dimana masyarakat Melayu sulit memasuki bidang perekonomian. Setelah itu pada tahun 1971 Tun Abd Razak mengajukan proposal mengenai kebijakan perekonomian yaitu NEP (*New Economy Programme*).

Sikap pemerintah Malaysia yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dan India tersebut didasarkan pada kekhawatiran yang timbul bahwa warga beretnis Tionghoa dan India pada saat itu memiliki kehidupan yang lebih baik daripada warga beretnis Melayu. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mematikan warga beretnis Melayu, sehingga kelak Malaysia akan dikuasai oleh warga beretnis Tionghoa atau India. Untuk menghindari kejadian tersebut terjadi dimasa depan, pemerintah Malaysia kemudian menerapkan kebijakan untuk melindungi etnis Melayu. Kebijakan *New Economic*

Policy yang dikeluarkan tersebut merupakan salah satu tonggak utama bentuk diskriminasi yang berwujud *affirmative action*. Inilah awal munculnya diskriminasi etnis yang justru dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap warga negaranya sendiri, suatu hal yang tercermin dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang justru mengancam persatuan dan kesatuan negara tersebut. Menurut Louis Wirth, kelompok minoritas adalah Sekelompok orang, karena karakteristik fisik atau budayanya, diasingkan dari orang lain dalam suatu kelompok dimana mereka mendapat perlakuan yang berbeda serta bersifat diskriminatif, dan kemudian menganggap diri mereka sebagai objek dari diskriminasi kolektif.¹ Warga keturunan Tionghoa dan India di Malaysia termasuk etnis “minoritas”, serta etnis imigran yang mempunyai perbedaan baik fisik dan budaya dari etnis Melayu, serta dianggap orang asing dan mendapat perlakuan diskriminatif, meskipun mereka secara sah adalah warga negara Malaysia.

Diskriminasi terhadap etnis tersebut juga terjadi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, serta budaya. Diskriminasi etnis India oleh pemerintah Malaysia sudah sangat jelas terlihat dalam diskriminasi politik maupun diskriminasi ekonomi dimana etnis non Melayu tidak memiliki hak-hak seperti yang didapatkan oleh etnis Melayu. Pemerintah Malaysia telah melakukan pengabaian kepada etnis non Melayu termasuk pengabaian

¹ L. Wirth, ‘The Problem of Minority Group’, in Ralph Linton (ed), *The Science of Man in the World Crisis*, Columbia University Press, New York, 1945, P.347

atas agama etnis non Melayu. Bahkan, pemerintah Malaysia tidak mengakui agama Hindu yang dianut oleh etnis India. Selain itu, pemerintah Malaysia justru menghancurkan kuil Hindu Malaimel Sri Selva Kaliamman yang telah berusia seabad di Kuala Lumpur.²

Inilah permasalahan yang ditimbulkan oleh pemerintah Malaysia, dan yang kini sedang dihadapi pula oleh pemerintah Malaysia. Permasalahan yang mengancam proses pembangunan kebangsaan negara tersebut. Akan tetapi, kedua etnis tersebut seringkali melakukan perlawanan terhadap diskriminasi, sehingga lama kelamaan pemerintah Malaysia menyadari bahwa diskriminasi terhadap dua etnis besar tersebut justru menjadi salah satu permasalahan yang mengancam stabilitas negara.

Pembangunan dalam suatu negara hanya dapat berjalan secara lancar jika kondisi negara tersebut dalam keadaan stabil, dalam arti bebas dari berbagai konflik internal dan ancaman dari luar. Untuk itu, pemerintah Malaysia yang semakin menyadari hal ini kemudian sedikit demi sedikit menghapuskan perlakuan diskriminasi tersebut dan berusaha memperbaiki proses pembangunan kebangsaan dengan meletakkan satu langkah kebijakan penting, yang dinamakan *1Malaysia Policy* di bawah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam babak baru proses

pembangunan kebangsaan yang diharapkan menjadi lebih baik, tanpa adanya diskriminasi terhadap etnis non-Melayu.³

Sebelum dikeluarkannya kebijakan *1Malaysia Policy*, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia dapat dikatakan merupakan positive discrimination. Positive discrimination merupakan sebuah bentuk kebijakan affirmative action yang dirancang untuk memperbaiki kelemahan dari suatu kelompok.

Salah satu tujuan utama dalam proses pembangunan kebangsaan di Malaysia adalah pembentukan identitas kebangsaan, dimana sebelumnya belum ada satu identitas yang menyatukan berbagai etnis yang ada di Malaysia. Lalu dalam perkembangannya pemerintah Malaysia berfikir untuk membuat suatu formula kebijakan dalam menyatukan masyarakatnya dalam memperkokoh negara dalam menghadapi globalisasi demi pencapaian nasional. Pada tahun 2010 pemerintah Malaysia memiliki satu kebijakan baru yang di kenal dengan kebijakan *One Malaysia*. Kebijakan ini disuarakan oleh perdana menteri Malaysia Sri Mohd Najib Bin Tun Abd Razak (*Malaysia has a dream*) dan untuk mencapai impian tersebut pemerintah membutuhkan seperangkat kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Perdana menteri Abdul Razak memperkenalkan "*One Malaysia Public Policy*" sebagai seperangkat

²http://www.malaysianbar.org.my/legal/general_news/council_demolishes_illegal_statue_and_temple_building.html, diakses pada tanggal 17 juni 2016. Pukul. 20.00 WIB

³*1Malaysia, About 1 Malaysia*, diakses pada tanggal 23 September 2016. Pukul 20.00 WIB.
<http://www.1malaysia.com.my/about/about-1malaysia/>

kebijakan dalam negeri pemerintah Malaysia. "*IMalaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan dikalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.*"⁴ - Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak –

Perdana Menteri Malaysia Pemerintah Malaysia melalui kepemimpinan perdana menteri Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak mengeluarkan suatu formula kebijakan publik yang didasarkan untuk memupuk semangat perpaduan bagi rakyat Malaysia dan suatu formula yang akan membantu untuk mencapai aspirasi negara, yaitu tercapainya Wawasan 2020 dimana Malaysia bergerak menjadi negara maju di kawasan Asia Tenggara. Perdana Menteri Tun Abdul Razak menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan *One Malaysia* ini bukanlah suatu formula kebijakan yang baru bagi masyarakat Malaysia dan negara Malaysia melainkan suatu formula kebijakan untuk melengkapi kebijakan-kebijakan yang telah ada dalam dasar-dasar konstitusi.

Pada dasarnya kebijakan ini merupakan kebijakan yang dianggap dapat menjembatani konflik yang terjadi antar suku bangsa di Malaysia. Kebijakan *one Malaysia* diharapkan dapat menghapus adanya ketimpangan sosial yang terjadi dengan menghapuskan perbedaan. Dalam *IMalaysia*, salah satu tujuan utamanya adalah pembentukan satu

identitas bagi seluruh warga Malaysia dari berbagai macam etnis, yaitu identitas sebagai Bangsa Malaysia. Sebelumnya, identitas etnis masih sangat ketara, sehingga menepikan identitas kebangsaan, suatu hal yang kemudian menimbulkan gesekan antar etnis di negara tersebut. Dengan dibangunnya satu identitas kebangsaan, diharapkan di masa mendatang timbul persatuan antar etnis, sehingga proses pembangunan kebangsaan akan berjalan dengan lebih baik.⁵

II. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menekankan pada proses yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan, serta implikasi kebijakan terhadap proses pembangunan kebangsaan (*nation-building process*) di Malaysia. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tatacara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi

4

http://www.kompasiana.com/aditabella/kebijakan-one-malaysia-public-policy_55006b7ba33311926f51104f#_ftn1, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016. Pada pukul 10.00 WIB

⁵ F. R. Kader, 'The Malaysian Experience in Developing National Identity, Multicultural Tolerance and Understanding Through Teaching Curricula: Lessons Learned and Possible Application in the Jordanian Context' *International Journal of Humanities and Social Sciences*, vol.2, No, 1, Januari 2012, hal. 275-276

mengenai keadaan yang ada.⁶ Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.⁷

Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.⁸

Fokus penelitian adalah kelompok etnis India di Malaka dan di Shah Alam Kuala Lumpur, dan di Shah Alam Selangor Kuala Lumpur. Fokus ini diambil karena untuk mengetahui integrasi etnis India Pasca Penetapan Kebijakan 1Malaysia Policy dan pandangan etnis India terhadap etnis Melayu. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, observasi langsung dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 26

⁷ Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1993), 71

⁸ Convelo G. Cevilla, dkk., *Ibid*, 73

III.HASIL

<p>Nama : Raja Umur : 50 Tahun Pekerjaan : Taxi Driver</p>		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda mengenai etnis Melayu?	Baiklah, kami sama aja
2.	Adakah anda merasa diasingkan oleh etnis Melayu?	Tidaklah, sama jugalah
3.	Bagaimana pendapat anda mengenai <i>IMalaysia Policy</i> ?	Oke, bagus
4.	Apakah anda telah merasakan dampak positif dari <i>IMalaysia Policy</i> itu sendiri di kehidupan anda? (jika tidak apa alasannya dan jika sudah berikan pula alasannya)	Tidak, tidak, tidak, kita tidak rasa. 1 Malaysia itu bagus juga because berkaumkan. Di Malaysia kita orang ni tidak di asingkan, Cina India Melayu sama juga.
5.	Adakah bentuk diskriminasi yang masih anda alami?	Tidak ada, kerajaan yang tak baguslah. Rakyat antara 1 sama lain tidak ada apa-apa.
6.	Apa harapan anda kedepannya?	Negeri ini kita belum tau lagi, mau bengkrapkah atau mau majukah. Pasal semua harga naik makanan apa-apa semua benda naik. Pendapata tak naik
7.	Bagaimana perasaan anda tentang negara India? Apakah anda bahagia di sini atau ingin kembali ke negara asal anda?	Kita orang sini, taklah kita orang Malaysia

<p>Nama : Christina Umur : 16 Tahun Pekerjaan : Pelajar</p>		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda mengenai etnis Melayu?	Biasa
2.	Adakah anda merasa diasingkan oleh etnis Melayu?	Adalah sikit-sikit
3.	Bagaimana pendapat anda mengenai <i>IMalaysia Policy</i> ?	After 1 Malaysia ni okelah bersatu padu
4.	Apakah anda telah merasakan dampak positif dari <i>IMalaysia Policy</i> itu sendiri di kehidupan anda? (jika tidak	Bagi saya rasis tu ada lagilah.

	apa alasannya dan jika sudah berikan pula alasannya)	
5.	Adakah bentuk diskriminasi yang masih anda alami?	Dia macam tengok dari agama macam tak ngam cakap tak sopan
6.	Apa harapan anda kedepannya?	Saya harap semua dipandang samalah takde rasis lagi
7.	Bagaimana perasaan anda tentang negara India? Apakah anda bahagia di sini atau ingin kembali ke negara asal anda?	Tak, saya warganegara sini. Mungkin nenek moyang ada sana. Tapi saya warganegara malaysia

<p>Nama : Shua Khumar Umur : 53 Tahun Pekerjaan : <i>Taxi Driver</i></p>		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan anda mengenai etnis Melayu?	Orang melayu sini okay, separuh okay separuh takda okay.
2.	Adakah anda merasa diasingkan oleh etnis Melayu?	Takda buat macam tu. Kita biasa je.
3.	Bagaimana pendapat anda mengenai <i>1Malaysia Policy</i> ?	Dia cakap satu Malaysia tapi dia bagi untuk orang melayu sahaja, kita India tak bagi, kemana – mana kita pergi.
4.	Apakah anda telah merasakan dampak positif dari <i>1Malaysia Policy</i> itu sendiri di kehidupan anda? (jika tidak apa alasannya dan jika sudah berikan pula alasannya)	1Malaysia dia cakap okay tapi tak ada sama-samalah. Untuk cakap dalam mulut sahaja.
5.	Adakah bentuk diskriminasi yang masih anda alami?	Kalau dia cakap 1Malaysia bumiputera dia bagi 20-30% discount bila beli rumah ke kreta ke. Apa beza dengan kita. Kita lahir sini beranak sini bumiputera juga tak dapat.
6.	Apa harapan anda kedepannya?	Samakan kami. Kalau bagi rakyat melayu kamipun kena bagi jugalah.
7.	Bagaimana perasaan anda tentang negara India? Apakah anda bahagia di sini atau ingin kembali ke negara asal anda?	Buat apa. Saya warga negara Malaysia. saya beranak sini. Saya bukan warganegara India. Buat apa saya pegi sana.

IV. PEMBAHASAN

Nasib para pendatang asal India lebih sulit lagi lantaran mereka hanya mampu bekerja sebagai buruh

rendahan di berbagai perkebunan karet. Ditambah lagi pelapisan sosial mereka menganut sistem kasta dan memiliki bahasa berbeda, sehingga menyulitkan mereka buat bersaing

dan melebur ke dalam masyarakat. Pemerintahan Malaysia menempatkan bangsa Melayu sebagai abdi negara, yakni menjadi pegawai catatan sipil. Tidak hanya itu mereka pun memiliki kesatuan militer dan hanya etnis Melayu boleh menjadi polisi. Praktik rasialisme dan diskriminasi terus berlanjut meskipun kebijakan *1 Malaysia* telah berlaku disana.⁹

Malaysia lebih saklek lagi mempraktekkan rasialisme dan diskriminasi lewat Pasal 153 Undang-Undang Malaysia. Pasal terdiri dari 10 ayat itu isi ayat pertamanya adalah Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) bertanggung jawab menjaga posisi penting bangsa Melayu dan pribumi dari salah satu Negara Bagian Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah dari masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan pasal ini.¹⁰ Lalu tertuang juga dalam *Bajet 2014 Kementerian Kewangan Malaysia*¹¹ yang disebutkan pada halaman 54 Pemerksaan Bumiputera poin 174 sampai 181. Dalam Bajet 2014, kerajaan menitik beratkan pada kesejahteraan kaum bumiputera terbukti tertuang dalam perundang-undangan dan kebijakan lainnya Adapun dalam poin berikutnya menyinggung mengenai pembangunan etnis India dengan memberi bantuan kepada beberapa

⁹ *Malaysia Negeri Rasis Berwajah Manis*. <https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-negeri-rasis-berwajah-manis.html>. Diakses pada tanggal 29 November 2016 Pukul 10 49 WIB

¹⁰ *Malaysia Negeri Rasis Berwajah Manis*. *Ibid*

¹¹ Kementerian Kewangan Malaysia. *Bajet 2014*. <http://www.treasury.gov.my/pdf/bajet/ucapan/ub14.pdf> diakses pada tanggal 30 November 2016 Pukul 22.38 WIB

Sekolah Kebangsaan Tamil. Namun, terlihat hanya sebatas bentuk balas jasa atas sokongan etnis India dalam pemilihan umum baru-baru ini.

Mengenai *1Malaysia Policy*, narasumber menjelaskan bahwa *1 Malaysia* itu hanya untuk orang Melayu saja.

“Dia cakap satu Malaysia tapi dia bagi untuk orang melayu sahaja, kita India tak bagi, kemana – mana kita pergi.”

Kemudian disambung seorang temannya dalam waktu bersamaan, ia mengatakan :

*“Itu bukan 1 Malaysia tapi Sapu Malaysia”*¹²

1Malaysia yang di gadang – gadang merupakan tonggak penyatu kaum di Malaysia hanyalah sebatas ucapan semata. Seperti yang disebut oleh narasumber :

*“1Malaysia dia cakap okay tapi tak ada sama-samalah. Untuk cakap dalam mulut sahaja.”*¹³

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh salah seorang pelajar yang peneliti temui di salah satu restoran di kawasan mall Shah Alam, Christie 16 Tahun mengatakan setelah *1 Malaysia* masih ada rasis, terutama jika bukan muslim. Seperti yang dikatakan narasumber :

¹² Maniam. 60 Tahun. *Taxi Driver*. Diwawancarai di halte bus Subang Bestari. Pada tanggal 04 November 2016 Pukul 16.45 WM

¹³ Shua Khumar. 53 Tahun. *Taxi Driver*. Diwawancarai di halte bus Subang Bestari. Pada tanggal 04 November 2016 Pukul 17.00 WM

"Bagi saya masih ada, dia orang memang tengok rasislah banyak. Macam diorang tengok je dari agama. Macam cakap tak sopan, tak layan ke lain ke."¹⁴

Menurut Louis Wirth, kelompok minoritas adalah Sekelompok orang, karena karakteristik fisik atau budayanya, diasingkan dari orang lain dalam suatu kelompok dimana mereka mendapat perlakuan yang berbeda serta bersifat diskriminatif, dan kemudian menganggap diri mereka sebagai objek dari diskriminasi kolektif.¹⁵ Warga keturunan Tionghoa dan India di Malaysia termasuk etnis "minoritas", serta etnis imigran yang mempunyai perbedaan baik fisik dan budaya dari etnis Melayu, serta dianggap orang asing dan mendapat perlakuan diskriminatif, meskipun mereka secara sah adalah warga negara Malaysia.

V. KESIMPULAN

Dari wajah manis yang ditampilkan di berbagai iklan promosi pariwisata bertajuk, *Truly Asia* ada satu kemelut dalam masyarakat mereka yang tidak bisa dipungkiri. Pemerintah negeri jiran itu ternyata mempraktekkan pembedaan etnis secara tajam. Bangsa Melayu bersikap rasis dan diskriminatif terhadap etnis lainnya, yakni salah satunya adalah India.

¹⁴ Christina. 16 Tahun. *Pelajar*. Diwawancarai di KFC Shah Alam. Pada tanggal 13 November 15.30 WM

¹⁵ L. Wirth, 'The Problem of Minority Group', in Ralph Linton (ed), *The Science of Man in the World Crisis*, Columbia University Press, New York, 1945, P.347

Ternyata sikap itu sudah dipelihara kaum bumiputera, julukan Malaysia bagi ras melayu Jauh sebelum Malaysia merdeka, gesekan antaretnis kerap terjadi.

Nasib para pendatang asal India lebih sulit lagi lantaran mereka hanya mampu bekerja sebagai buruh rendahan di berbagai perkebunan karet. Ditambah lagi pelapisan sosial mereka menganut sistem kasta dan memiliki bahasa berbeda, sehingga menyulitkan mereka buat bersaing dan melebur ke dalam masyarakat. Pemerintahan Malaysia menempatkan bangsa Melayu sebagai abdi negara, yakni menjadi pegawai catatan sipil. Tidak hanya itu mereka pun memiliki kesatuan militer dan hanya etnis Melayu boleh menjadi polisi. Di bidang pendidikan, penjajah membantu mereka dengan mendirikan sekolah khusus Melayu. Praktik rasialisme dan diskriminasi terus berlanjut meskipun kebijakan *1 Malaysia* telah berlaku disana.

Malaysia lebih saklek lagi mempraktekkan rasialisme dan diskriminasi lewat Pasal 153 Undang-Undang Malaysia. Pasal terdiri dari 10 ayat itu isi ayat pertamanya adalah, "Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) bertanggung jawab menjaga posisi penting bangsa Melayu dan pribumi dari salah satu Negara Bagian Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah dari masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan pasal ini."

Pasal 153 itu telah dikritik sejak lama dan dianggap menjadi landasan hukum agar orang Melayu bisa berlaku rasis dan diskriminatif terhadap etnis lain. Lebih

mengerikan lagi adalah sikap pembedaan itu tidak kenal batas dan waktu. Bentuk nyata dari pemberlakuan pasal itu terlihat di bidang ekonomi. Bumiputera bisa mendapat potongan harga dalam membeli rumah, mobil, dan benda lainnya sementara etnis lain tidak. Atas dasar pasal 153 pemerintah Malaysia tidak sembarangan memberi kewarganegaraan terhadap etnis China dan India. Mereka bakal diberi kartu penduduk jika tunduk terhadap peraturan dan menerima semua persyaratan. Politisi Singapura, Lee Kuan Yew, adalah tokoh paling lantang menentang kebijakan berbau rasialis dan diskriminatif itu. Tidak ketinggalan pentolan oposisi, Anwar Ibrahim, secara tegas tidak setuju dengan pasal itu dan meminta semua produk turunannya dihapus.

Istilah bumiputera dan perkauman dipakai selama ini mencerminkan sikap rasis pemerintah dan menjadi pembenaran buat mencegah etnis lain ikut serta dalam pemerintahan. Lebih tegas lagi pernyataan politisi Partai Aksi Demokrasi, Dr. Boo Cheng Hau, yakni mensejajarkan praktik bumiputeraisme dengan politik apartheid. Meski akhir-akhir ini pemerintah Malaysia dalam beberapa sektor menyerap tenaga kerja non-bumiputera, tapi dianggap hanya mencari dukungan sesaat menjelang pemilihan umum tahun ini. Entah sampai kapan bumiputera bisa hidup nyaman di negeri Melayu sementara lainnya harus tertindas.

Integrasi etnis India pasca penetapan kebijakan *IMalaysia Policy* belum berjalan dengan baik. Diskriminasi etnis India yang terjadi

di Malaysia tergolong dalam kategori ekstrim diskriminasi. Sesuai dengan indikator-indikator diskriminasi yang dikemukakan oleh Robert Ted Gurr dalam bukunya *Ethnic Conflict in World Politics* dalam pembahasan diskriminasi politik dan diskriminasi ekonomi yang terjadi di Malaysia termasuk dalam kategori ekstrim diskriminasi. Walaupun diskriminasi budaya yang dialami oleh etnis India termasuk dalam kategori diskriminasi yang bersifat substansial. Sebab dari enam indikator diskriminasi budaya yaitu: *Ethnicity or Nationality, Language, Religion, Social Customs, Historical origin, Urban vs rural residence*. Hanya tiga indikator diskriminasi budaya yang ditemukan oleh penulis dalam kasus diskriminasi etnis India di Malaysia. Adapun indikatornya adalah : *Ethnicity, Religion, Urban vs rural residence*.

DAFTAR PUSTAKA

1. JURNAL

Kader, F. R. The Malaysian Experience in Developing National Identity, Multicultural Tolerance and Understanding Through Teaching Curricula: Lessons Learned and Possible Application in the Jordanian Context' *International Journal of Humanities and Social Sciences*, vol.2, No, 1, Januari 2012. hal. 275-276.

2. BUKU

Cevilla, Convelo G, dkk.,1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara

3. MEDIA LAINNYA

L, Wirth. 1945. The Problem of Minority Groups. page 347 in Ralph Linton (ed.), *The Science of Man in the World Crisis*. New York: Columbia University Press.

Kementerian Kewangan Malaysia. *Bajet 2014*. Terbitan Pejabat Perdana Menteri. *1Malaysia*

4. INTERNET

1Malaysia, *About 1 Malaysia*, diakses pada tanggal 23 September 2016. Pukul 20.00 WIB. <http://www.1malaysia.com.my/about/about-1malaysia/>

Malaysia Negeri Rasis Berwajah Manis. <https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-negeri-rasis-berwajah-manis.html>. Diakses pada tanggal 29 November 2016 Pukul 10 49 WIB

http://www.malaysianbar.org.my/legal/general_news/council_demolishes_illegal_statue_and_temple_building.html, diakses pada tanggal 17 juni 2016. Pukul. 20.00 WIB

http://www.kompasiana.com/aditabela/kebijakan-one-malaysia-publicpolicy_55006b7ba33311926f51104f#_ftn1, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016. Pada pukul 10.00 WIB